

PENANAMAN NILAI-NILAI PLURALIS MELALUI MODEL PENDIDIKAN TRANSFORMATIF LEARNING PADA PONDOK PESANTREN NURUL IKHLAS NEGARA

Saihu

Dosen Institut PTIQ Jakarta

Email: made_syaikhu@yahoo.com

Abstract: *The following article discusses planting the values of pluralism through a model of transformative learning at Nurul Ikhlas Negara Islamic Boarding School. Based on information provided by three resource persons. The paper focuses on how the process of religious learning in the perspective of pluralism aims to shape the character of students and residents around boarding schools. Data sources are obtained through unstructured observation and interviews during 2017 to 2018. This paper uses the theory of peace education proposed by John Dewey based on the educational philosophy of progressiveness. This paper shows that in instilling pluralist, humanist, and tolerant characters, educational activities at Nurul Ikhlas Islamic Boarding School using transformative learning education models are followed by strengthening the values of the standard pattern of character planting in most pesantren in Indonesia. Namely through planting the values of at-tanawwu'iyah, al-musawah wal-'adl, al-tasamuh, al-musyawah, al-ukhuwwah, and al-salam.*

Keywords: Education, Pluralism, Character, Transformative Learning

Abstrak: *Artikel berikut ini membahas penanaman nilai-nilai pluralisme melalui model pendidikan transformative learning pada Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Negara. Mendasarkan pada informasi yang diberikan oleh tiga nara sumber. Tulisan itu memusatkan pada bagaimana proses pembelajaran agama dalam perspektif pluralisme yang bertujuan membentuk karakter peserta didik dan warga sekitar pesantren. Sumber data diperoleh melalui observasi tidak terstruktur dan wawancara selama 2017 hingga 2018. Tulisan ini menggunakan teori peace education yang dikemukakan oleh John Dewey berdasarkan dari filsafat pendidikan progresifisme. Tulisan ini menunjukkan bahwa dalam*

menanamkan karakter pluralis, humanis, dan toleran, kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas menggunakan model pendidikan transformative learning diikuti dengan pemantapan nilai-nilai dari pola standar penanaman karakter di sebagian besar pesantren di Indonesia. Yaitu melalui penanaman nilai at-tanawwu'iyah, al-musawah wal-'adl, al-tasamuh, al-musyawah, al-ukhuwwah, dan al-salam.

Kata Kunci: Pendidikan, Pluralisme, Karakter, Transformative Learning

Pendahuluan

Tidak ada kontroversi dikalangan para ahli dalam dunia pendidikan Islam, bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan asli Indonesia, sekaligus bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pertumbuhan pendidikan masyarakat Indonesia. Di daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam maupun daerah yang masyarakatnya minoritas beragama Islam, pesantren tetap merupakan suatu lembaga pendidikan agama yang tidak pernah menghilangkan ciri ke-khasan-nya. Untuk memantapkan kerjanya, pesantren memiliki komponen-komponen yang selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Komponen itu antara lain masjid, santri, pengajaran kitab Islam klasik (kitab kuning), dan kiai yang menjadi elemen dasar dalam tradisi pendidikan di pesantren.¹

Kata pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan *pe* di depan dan berakhiran *an* yang berarti tempat tinggal para santri. Santri, dalam bahasa Tamil berarti guru mengaji, sedang C.C. Berg, berpendapat, bahwa kata santri berasal dari kata *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata Shastra yang berarti buku-buku suci, seperti buku-buku agama atau buku-buku ilmu pengetahuan. Dari asal-usul kata santri pula banyak para ahli berpendapat bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan bangsa Indonesia yang pada masa lalu menganut agama Hindu-Budha bernama “mandala” yang kemudian di “Islamkan” oleh para kiai.

Pesantren juga merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik. Letak keunikannya dapat dilihat pada gambaran lahiriahnya dimana pesantren adalah sebuah kompleks yang di dalamnya berdiri beberapa bangunan, meliputi; rumah kediaman pengasuh (di Jawa dipanggil kiai, di daerah yang berbahasa sunda dipanggil ajengan, di Madura dipanggil Nun atau bendara yang selanjutnya di disingkat menjadi Ra), sebuah surau atau masjid, tempat pengajaran (madrasah), dan asrama tempat tinggal para santri.²

Dalam lingkungan fisik seperti itu, diciptakan cara kehidupan yang memiliki sifat dan ciri tersendiri. Dimulai dengan jadwal kegiatan

¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 79.

² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, 41.

yang menyimpang dari pengertian rutin kegiatan masyarakat pada umumnya. Misalnya, kegiatan di pesantren berputar dan berdasarkan pada pembagian periode waktu salat lima waktu (salat rawatib), seperti waktu pagi, siang, dan sore, di pesantren berbeda dengan pengertian aslinya. Maka tidaklah mengherankan, apabila sering dijumpai santri menanak nasi di tengah malam buta atau mencuci pakaian menjelang terbenamnya matahari. Dimensi waktu yang unik ini tercipta karena kegiatan pokok pesantren dipusatkan pada pemberian pengajian pada setiap habis menjalankan salat rawatib sekaligus mewajibkan kegiatan lain harus tunduk dan patuh atau disesuaikan dengan pembagian waktu pengajian.³

Selama berabad-abad Lembaga pendidikan pesantren telah berkembang khususnya di Jawa. Cikal bakal pesantren, sebagaimana dijelaskan oleh Zuhri di mulai sejak zaman Maulana Malik Ibrahim, yang olehnya disebut sebagai *the spiritual father of Walisongo* (dalam masyarakat santri Jawa dipandang sebagai gurunya tradisi pesantren di tanah Jawa).⁴ Sementara menurut Azyumardi Azra, selain merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren juga merupakan lembaga pendidikan yang dihasilkan dari produk budaya Indonesia, dimana sejarah kehadirannya sangat erat kaitannya dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oleh karena itu, ketika membahas pesantren di tanah air, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang dinamika sejarah Islam itu sendiri.⁵

Pesantren, dikatakan sebagai hasil dari produk budaya Indonesia, karena pesantren memiliki akar yang kuat (*indigenous*) pada masyarakat Muslim Indonesia, yang dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya (*survival system*), serta memiliki model pendidikan multi aspek. Santri atau murid yang belajar di pesantren, tidak hanya dididik menjadi seseorang yang mengerti ilmu agama, tetapi juga mendapat tempaan kepemimpinan, kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan, kesetaraan, dan sikap positif lainnya. Modal inilah yang diharapkan melahirkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri sebagai bentuk partisipasi pesantren dalam menyukseskan tujuan pembangunan nasional sekaligus berperan aktif dalam

³ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Keindonesiaan dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta, the Wahid Institut, 2007), 90.

⁴ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'rifat, 1979), 37.

⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2005), 1-6.

mencerdaskan bangsa sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.⁶

Dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, posisi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki tempat yang istimewa. Letak istimewanya adalah di satu sisi pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan non-formal, tetapi di sisi lain pesantren juga dapat menjadi lembaga pendidikan formal.⁷ Sebagai lembaga pendidikan yang *concern* di bidang keagamaan, pesantren memiliki ketentuan-ketentuan proses pendidikan dan pembelajarannya yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, yang berbunyi; *Pertama*, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *Kedua*, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama; *Ketiga*, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal; *Keempat*, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.⁸

Jika dilihat lebih dalam, keterkaitan antara pesantren dengan masyarakat sekitarnya sangat erat.⁹ Sehingga banyak dijumpai pondok pesantren tumbuh dan berkembang umumnya di daerah pedesaan, karena tuntutan masyarakat yang menghendaki berdirinya pondok pesantren sebagai lembaga kontrol sosial terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini juga sudah banyak pesantren yang berdiri di daerah perkotaan. Hal ini dikarenakan perkembangan dari daerah itu sendiri yang awalnya sebuah desa,

⁶ Amin Haedari, et al., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*. Cet. I (Jakarta: IRD Press, 2004), 3.

⁷ Cikal bakal Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dapat dilihat dari: 1) Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional (Yahya A. Muhaimin) dan Menteri Agama (M. Tolhah Hasan), No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tertanggal 30 Maret 2000; 2) Keputusan bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI (H. Husni Rahim) dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI (H. Indra Djati Sidi), No. E/83/2000 dan No. 166/C/KEP/DS-2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar, tertanggal 6 Juni 2000. Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 59.

⁸ Surayin, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Yrama Widya, 2004), 58-59. Selain itu pesantren juga harus senantiasa apresiatif dan selektif merespons perkembangan dan pragmatisme budaya. Abu Yazid, *Paradigma Baru Pesantren: Menuju Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 267.

⁹ Lihat Surayin, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 95.

berkembang menjadi daerah pusat industri, pendidikan, ataupun pemerintahan.¹⁰ Dengan demikian, pesantren sesungguhnya terbangun dari konstruksi kemasyarakatan dan epistemologi sosial yang menciptakan suatu transendensi atas perjalanan historis sosial.

Pengaruh utama yang dimiliki pesantren atas kehidupan masyarakat, terletak pada interaksi perorangan yang menembus batas hambatan yang diakibatkan dari perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat. Interaksi ini merupakan jalur timbal balik yang memiliki dua fungsi, yaitu; mengatur bimbingan spiritual—dari pihak pesantren kepada masyarakat—dalam soal-soal perdata agama (*perkawinan, hukum waris, dan sebagainya*), dan soal-soal ibadah ritual yang mengatur pemeliharaan material finansial oleh masyarakat dalam bentuk pengumpulan dana dan sebagainya.

Pentingnya keberadaan pesantren ini adalah karena selain sebagai salah satu pemicu terwujudnya kohesi sosial, keberadaan pesantren hadir dan terbuka dengan mengedepankan nilai-nilai ketaatan, keikhlasan, kesetiakawanan, kebersamaan, persamaan, saling tolong-menolong, kesederhanaan, kebersamaan, saling menghargai, dan saling menghormati.¹¹ Konsepsi perilaku (*sosial behavior*) yang ditampilkan pesantren ini, mempunyai daya rekat sosial yang tinggi dan sulit ditemukan pada institusi pendidikan lainnya.¹² Begitu juga dengan genealogi pesantren yang telah lama berkembang dan muncul sejak pra-kemerdekaan, selain mengajarkan agama, pesantren juga mengajarkan nilai-nilai moralitas dan *local wisdom* kebhinekaan.

Dengan demikian, baik agama Islam maupun pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, tidak pernah mengajarkan tindakan radikalisme,¹³ terorisme, karena berdirinya pesantren memiliki misi untuk menyebar-luaskan informasi, ajaran, dan doktrin tentang universalitas Islam ke seluruh pelosok Nusantara yang plural-multikultural sehingga menghasilkan atau dapat membentuk pribadi-

¹⁰ Rela Mar'ati, "Pesantren Sebagai Basis Pendidikan Karakter: Tinjauan Psikologis", *Jurnal Al-Murabbi*, 1, No. 01 (2014): 1-15.

¹¹ Abu Yazid, *Paradigma Baru Pesantren: Menuju Pendidikan Islam Transformatif*, 87.

¹² Saipul Hamdi, *Pesantren dan Gerakan Feminisme di Indonesia* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2017), 41.

¹³ Banyak ilmuwan yang menyamakan istilah radikalisme agama dengan fundamentalisme agama (*uṣūliyyūn*), "kaum Islamis" (*islāmiyyūn*), "kaum otentik atau asli" (*aṣliyyūn*), "pengikut para sahabat utama (*salafiyūn*), "militant" atau bahkan "neo-fundamentalisme", hal ini disebabkan karena gerakan-gerakan pemikiran istilah-istilah ini memiliki kemiripan-kemiripan tertentu yang menyerupai ciri-ciri dalam radikalisme. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 109.

pribadi Muslim yang selain dalam ilmu agamanya, juga memiliki watak yang humanis, toleran, dan pluralis.¹⁴

Metodologi

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian lapangan (*Field Research*)¹⁵ yang bersifat eksploratif, bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pendidikan agama di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Negara-Bali dalam perspektif pluralisme. Yaitu bagaimana dimensi pluralisme teraktualisasi dengan baik dalam pembelajaran agama dan dapat direfleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari oleh para santri pada lembaga pendidikan tersebut. Secara spesifik, tulisan ini fokus pada bagaimana dimensi pluralisme teraktualisasi dalam model pembelajaran, kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan efektifitas pembelajaran pluralisme pada Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Negara melalui model pembelajaran *transformative learning*.

Dengan narasi yang berbeda, tulisan ini dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian dengan cara melakukan deskripsi pada suatu konteks pendidikan agama yang berbasis pada nilai-nilai yang diperlukan dalam konteks masyarakat yang plural-multikultural. Data atau hasil dari tulisan ini diperoleh selama tahun 2017-2018 dengan melakukan observasi terhadap aktivitas pendidikan keagamaan di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Negara-Bali. Wawancara dilakukan terhadap satu orang Kyai (pengasuh), dua guru yang beragama Hindu, dan tiga orang santri. Wawancara difokuskan untuk menggali latar belakang sosiologis dan pengalaman proses pendidikan sehari-hari pada lembaga ini.

Untuk tujuan tersebut, maka tulisan ini lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab dalam penelitian kualitatif, peneliti mengkaji sesuatu dalam *setting* natural dan menafsirkan fenomena

¹⁴ Syamsul Ma'arif, "Transformative Learning Dalam Membangun Pesantren berbasis Multikultural", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 1, No.1, (2012): 58-71.

¹⁵ Menurut Kenneth D. Bailey istilah studi lapangan (*Field Research*) merupakan istilah yang sering digunakan bersamaan dengan istilah studi etnografi (*ethnographic study* atau *ethnography*). Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research* (New York: A Division of Macmillan Publishing Co. Inc, 1982), 254. Lawrence Neuman juga menjelaskan, bahwa penelitian lapangan juga sering disebut etnografi atau penelitian participant observation. Akan tetapi, menurut Neuman, etnografi hanyalah merupakan perluasan dari penelitian lapangan. Etnografi mendefinisikan kembali bagaimana penelitian lapangan harus dilakukan. W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods* (Qualitative and Quantitative Approaches), eds., (Boston: Allyn and Bacon, 2003), 363-366.

terkait dengan makna.¹⁶ Penelitian kualitatif sebagaimana yang dikatakan oleh Sharan B. Merriam, memiliki empat karakteristik utama yaitu: 1) menekankan pada proses, pemahaman, dan makna; 2) peneliti berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data; 3) proses bersifat induktif; dan 4) hasilnya bersifat deskripsi yang kaya.¹⁷

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengambil jarak antara peneliti dengan subjek penelitian, penelitian kualitatif menyatu dengan situasi objek yang diteliti (*personally involved with research participants, to the points of sharing perspective*).¹⁸ Selain itu, Lincoln dan Guba mengidentifikasi beberapa perbedaan aksioma pada penelitian kualitatif,¹⁹ yang relevan dengan penelitian ini meliputi:

a. Sifat Realitas

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post-positivisme,²⁰ atau paradigma *interpretive*. Yaitu suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh (*holistic*) karena setiap aspek dari objek itu mempunyai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

b. Hubungan Peneliti dengan Yang Diteliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai *human instrument* melalui teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan juga *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.

¹⁶ Sharan B. Merriam, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (USA: The Jossey-Bass, 2009), 13.

¹⁷ Sharan B. Merriam, *Qualitative Research*, 14.

¹⁸ Secara rinci perbedaan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat dilihat dalam Meredith D. Gall, Joyce P. Gall, dan Walter R. Borg, *Educational Research: An Introduction*, 7th eds (Boston: Pearson Education, Inc, 2003), 25.

¹⁹ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Newbury Park: SAGE, 1985), 37.

²⁰ Dinamakan metode post-positivistik, karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Seperti kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 13-15.

Dengan demikian peneliti kualitatif mengenal betul orang yang memberikan data.

c. Hubungan Antar

Dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi (*reciprocal/ interaktif*).

d. Kemungkinan Generalisasi

Penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi, tetapi lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Walaupun penelitian kualitatif tidak membuat generalisasi, tidak berarti hasil penelitian kualitatif tidak dapat diterapkan di tempat lain. Generalisasi dalam penelitian kualitatif disebut dengan *transferability* (keteralihan). Maksudnya adalah bahwa, hasil penelitian kualitatif dapat ditransferkan atau diterapkan di tempat lain, manakala kondisi tempat lain tersebut tidak jauh berbeda dengan tempat penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Sebagai salah satu varian dalam penelitian kualitatif, studi kasus memberikan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai suatu setting tertentu, dokumen, atau suatu kejadian tertentu.²¹ Dengan mempelajari secara maksimal mengenai hal ini, peneliti ingin mendapatkan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai aktualisasi model pendidikan pluralisme agama di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Negara-Bali. Kelebihan dari metode studi kasus sebagaimana diungkapkan oleh Lincoln dan Guba, adalah berikut:²²

- a. Studi kasus merupakan sarana utama bagi peneliti emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang di teliti;
- b. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh pada apa yang dialami dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden;

²¹ Robert Bogdan dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1998), 54.

²² Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*, 356.

- d. Studi kasus memungkinkan untuk menemukan konsistensi internal yang tidak merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual, tetapi juga keterpercayaan (*trust-worthiness*);
- e. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan dalam konteks tersebut;

Dengan pendekatan dan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi pendidikan pluralisme agama di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Negara-Bali.

Selanjutnya, dalam melihat proses pendidikan pluralisme agama di lembaga ini, penelitian menggunakan teori *peace education* (pendidikan damai). *Peace education* adalah sebuah teori pendidikan yang didasarkan pada aliran pendidikan progressivisme yang dipelopori oleh John Dewey (1859-1952). Menurutnya, belajar adalah pengalaman nyata dari lapangan.²³ Dewey, berargumen bahwa pendidikan merupakan transaksi antara *person* dengan lingkungannya.²⁴ Atau dengan kata lain, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang memiliki variasi proses dan pengalaman belajar di setiap lembaga pendidikan.²⁵

Selain itu, Dewey, memandang peserta didik sebagai sesuatu yang fungsional dalam hidup sosial. Peserta didik dalam pandangan progressivisme adalah organisme yang mengalami satu proses pengalaman. Sebab peserta didik merupakan bagian integral dari lingkungan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, interaksi sosial, perasaan, pikiran dan benda-benda di sekitarnya.²⁶ Jika lingkungan belajar itu damai, menyenangkan, penuh toleransi, maka kondisi tersebut berdampak pada pengalaman belajar dan kondisi kejiwaan yang didapat oleh peserta didik. Karena menurut Dewey, pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman serta meningkatkan kemampuan untuk menentukan arah bagi pengalaman berikutnya berangkat dari pengalaman yang didapat sebelumnya.²⁷

²³ Muhammad Allazam, "Learning from Dewey and Vygotsky Perspective", *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 6, No. 7 (2015): 156-168.

²⁴ Lihat Saifullah Idris, *Demokrasi dan Filsafat Pendidikan* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), 42.

²⁵ Keiran Egan, *Getting it Wrong from the Beginning Our Progressivist Inheritance from Herbert Spencer, John Dewey and Jean Peaget* (Binghamton: Vail Ballou, 2002), 53-68.

²⁶ Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, 250.

²⁷ Syabuddin Gade, "Perbandingan Konsep Dasar Pendidikan antara Dewey dan Asy-Syaibani", *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 7, No. 1 (2011): 86.

Peace education, sebagai sebuah teori pendidikan yang mempromosikan pengetahuan, keahlian-keahlian, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membawa perubahan tingkah laku peserta didik.²⁸ Dalam implementasinya,²⁹ *peace education* menghubungkan kecerdasan intelektual "supra-rasional" dan kesadaran spiritual "supra-religius" pada puncak-puncak pencapaian daya kreativitas peserta didik. Daya-daya yang terdapat pada peserta didik meliputi nafsu dan insting. Meliputi: pencegahan (*to prevent*) konflik dan kekerasan; menyelesaikan (*to resolve*) konflik secara damai; dan menciptakan (*to create*) kondisi yang kondusif. Maka dari nafsu dan insting tersebut, proses pendidikan mempunyai dua dimensi, yaitu; dimensi psikologis dan dimensi sosiologis. Dari dimensi psikologis, pendidik harus dapat mengetahui tenaga-tenaga atau daya-daya yang ada pada anak didik yang akan dikembangkan. Sementara dari dimensi sosiologis, pendidik harus mengetahui ke mana tenaga-tenaga itu harus dibimbingnya. Selanjutnya tenaga-tenaga yang telah dibimbing tersebut, harus diabdikan pada kehidupan sosial serta mampu menciptakan kohesi sosial (perdamaian di masyarakat).³⁰

Ketertarikan Dewey pada *peace education* terlihat ketika dia menilai, bahwa *peace education* harus dilandasi moralitas, nilai-nilai demokrasi dan etika religius dan budaya yang berkaitan erat pada manusia sebagai makhluk sosial. Dorongan dasar filsafat untuk *peace education* setelah 1918 adalah memformulasikan metode intelegensi; suatu metode yang tidak diskriminatif seperti halnya melawan adanya propaganda. Di sini, lembaga pendidikan perlu menghilangkan permusuhan lewat pendekatan pendidikan *peace education*, serta merekonstruksi kebiasaan sosial dan politik yang ada. Dewey, yakin bahwa lembaga pendidikan bisa berfungsi sebagai dasar untuk perubahan yang dinamis,³¹ mengarahkan kepada sesuatu yang benar, bukan lembaga reflektif.

²⁸ Moh. Toriqul Chaer, "Islam dan Pendidikan Cinta Damai", *Jurnal Pendidikan Islam*, 2, No. 1 (2016): 234-249. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/istawa/article/view/363>. Diakses, tanggal 24 Januari 2018.

²⁹ Lihat R. Ridwan Hasan Saputra, *Berfikir Supra Rasional* (Jakarta: Republik, 2016), 72.

³⁰ John Dewey, *Democracy and Education, an Introduction to the Philosophy of Education* (New York: The Macmillan Company, 1964), 9.

³¹ Sekolah merupakan sarana pewarisan budaya, bahkan sekolah merupakan cerminan dari budaya yang mereka dapatkan di masyarakat "a chance to be a miniature community, an embryonic society." Sebagai sebuah miniatur masyarakat, Dewey mengidentifikasi tiga peranan sekolah; *Pertama*, menyederhanakan lingkungan-lingkungan sosial kedalam porsi-porsi ukuran atau potongan untuk lebih memudahkan pencernaan pengetahuan oleh peserta didik; *Kedua*, sekolah-sekolah memurnikan dan mengidealiskan keberadaan kebiasaan-kebiasaan sosial; *Ketiga*, sekolah-sekolah harus mempersiapkan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengalami sebuah pengalaman yang lebih luas daripada

Sebagai instrumen reformasi, lembaga pendidikan bisa mencari dan memperkuat pola konkret untuk membuat pola kehidupan masyarakat di atas perdamaian. Sementara pada saat yang sama, lembaga pendidikan memungkinkan membuat setiap peserta didik menyadari potensinya di dunia untuk membangun kehidupan damai tanpa kekerasan.³²

Menurut Dewey, teori *peace education* (pendidikan damai) dapat menjadi strategi dalam rangka proses deradikalisasi umat beragama. Sebab dalam pendidikan damai, memberikan pandangan, wawasan dan keterbukaan kepada peserta didik terkait dengan realita pluralitas umat manusia baik dari segi suku, agama, budaya, ras, bahasa, dan lain-lain. Keragaman yang ada bukanlah hal yang harus ditolak, tetapi dikelola dan disyukuri sebagai kekayaan dan potensi yang memberikan berkah kehidupan umat. Oleh karena itu, bagi Dewey, aspek-aspek yang harus dikembangkan dan diajarkan dalam pendidikan adalah perdamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*), hak asasi manusia (*human rights*), demokrasi (*democracy*), toleransi (*tolerance*), pemahaman antar bangsa dan antar budaya (*international and intercultural understanding*), serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa (*cultural and linguistic diversity*).³³

Teori pendidikan semacam ini memberikan pemahaman dan kesadaran kepada peserta didik tentang pentingnya sikap “toleransi aktif” dalam kehidupan umat yang sangat beragam. Sikap “toleransi aktif” dalam konteks ini bukan berarti hanya sekedar membiarkan orang lain ada, tetapi juga bagaimana mengembangkan kebersamaan dan saling pengertian. Dengan begitu maka toleransi menjadi sarana minimal atau modal dasar bagi terwujudnya hubungan antar umat beragama yang saling menghormati dan menyadari. Maka secara otomatis sikap-sikap radikal yang mengarah kepada konflik umat beragama satu terhadap umat agama lain dapat di-eliminasi. Apalagi dalam pandangan aliran progressivisme sebagai basis filsafat pendidikan damai, memandang pendidikan sebagai suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya tetap *survive* terhadap semua tantangan kehidupannya yang secara praktis senantiasa mengalami kemajuan dalam

masyarakat sekitar atau tempat dimana mereka dilahirkan. Jo Ann, Boydston, eds., *John Dewey, the Later Works: 1925-1953*, Jilid, 2 (Carbondale, USA: Southern Illinois University Press, 1969), 12.

³² Charles F. Howlett, *John Dewey and Peace Education* (Columbia: Columbia University, 2008), 2.

³³ Imam Machali, “Peace education dan deradikalisasi agama”, *Jurnal Pendidikan Islam*, 2, No. 1 (2013): 41-64.

bermasyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama ras, budaya dan lain-lain.³⁴

Teori penelitian di atas, merupakan sebuah sistem pengkajian dan penelitian yang dirasa tepat untuk mengeksplorasi proses pendidikan pluralisme agama di Jembrana. Melalui teori *peace education*, selanjutnya akan menghasilkan sebuah teori baru, yaitu agama dan budaya yang ter-integralisasi dalam proses pendidikan dapat meminimalisasi konflik antar suku, agama, ras dan golongan (SARA).

Pembahasan

Realitas sejarah pesantren pada dasarnya dilahirkan untuk memberikan respons terhadap situasi dan kondisi sosial suatu masyarakat yang tengah dihadapkan pada semakin runtuhnya sendi-sendi moral melalui transformasi nilai yang ditawarkannya (amar makruf nahi munkar). Sisi lain dari pesantren adalah bahwa pesantren dapat juga disebut sebagai agen perubahan sosial yang selalu melakukan kerja-kerja pembebasan pada masyarakat dari kemerosotan moral, penindasan dan kemiskinan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pesantren masih menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebajikan terutama menyangkut nilai-nilai plural-multikultural? Pembelajaran seperti apakah yang dapat diterapkan dalam pesantren berbasis multikultural? Sebab, jika melihat pembelajaran di pesantren selama ini, yang oleh banyak kalangan dilihat justru sangat berlawanan dengan nilai-nilai globalisasi.

Berdasarkan pengamatan pada Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Negara, dalam menjawab fenomena di era pluralitas agama dan budaya terlebih lagi Bali dan khususnya Jembrana. Dalam aktivitas pendidikannya, Pondok Pesantren Nurul Ikhlas menggunakan model pendidikan *transformative learning*.³⁵ Model pendidikan *transformative learning* adalah sebuah proses pendidikan atau pembelajaran yang lebih menekankan pada berpikir reflektif dan dialog terbuka, sekaligus

³⁴ Muhmidayeli, *Filsafat Pendidikan* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 156.

³⁵ Model Pembelajaran adalah suatu pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran di kelas atau lainnya. Selanjutnya para ahli menyusun berbagai model pembelajaran berdasarkan pada teori-teori pendidikan, antara lain; teori psikologis, teori sosialis, atau teori-teori lain yang dijadikan pola pilihan oleh pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 245.

mentrasformasikan cara pandang setiap individu yang *taken for granted*.³⁶

Menurut KH. Fathurrahim,³⁷ pengasuh pesantren yang juga sekaligus tokoh lintas agama di Kota Negara menjelaskan, bahwa penggunaan model pendidikan seperti ini bertujuan untuk membentuk santri-santrinya agar berwatak pluralis, sekaligus dapat melakukan perubahan ke arah sikap yang bisa menerima kenyataan, bahwa sesungguhnya perbedaan yang terjadi di masyarakat adalah kehendak Tuhan (*sunatullah*). Melalui model pendidikan seperti ini, ia berharap dapat menciptakan serta mengarahkan santri yang akan terjun ke masyarakat untuk dapat saling menghormati, memiliki sikap tenggang rasa yang tinggi, bertoleransi pada setiap perbedaan, serta dapat bekerja sama kepada masyarakat lain yang berbeda etnis, agama dan budaya, demi menjaga kedamaian di Indonesia khususnya Jember yang mayoritas beragama Hindu.

Selain itu, model *transformative learning* dapat merangsang pemahaman, peran dan keterampilan masyarakat pesantren melalui penyelarasan antara otak (*head*), akhlak (*heart*), dan keterampilan tangan (*hand*).³⁸ Secara efektif, model ini memberikan panduan dalam melakukan perbaikan atau perubahan pada pesantren, terutama terkait upaya penanaman dan *transfer of knowledge* tentang nilai-nilai multikultural di masyarakat serta memberikan sejumlah pengalaman baru yang bermanfaat bagi pengembangan peran santri dalam memecahkan permasalahan yang akan dihadapi. Seperti bagaimana masyarakat pesantren harus menanggulangi dan ikut memecahkan permasalahan konflik dan sentiment keagamaan yang sedang menghantui masyarakat Indonesia dewasa ini.

Ketika penulis mempertanyakan tentang kurikulum yang bernuansa pluralis, KH. Fathurrahim, menjelaskan,³⁹ bahwa kurikulum yang pasti berbicara tentang pluralisme di pondok pesantren yang ia pimpin belum ada, tetapi dalam setiap proses pembelajaran yang didasarkan pada “tiga pilar kurikulum pendidikan pesantren”, yaitu kajian kitab kuning, pendidikan karakter/akhlak, dan pendidikan al-Qur’an, yang di dalamnya ada materi tauhid, fikih, kalam, tafsir, hadits

³⁶ Lihat Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural* (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011), 12.

³⁷ Wawancara dengan Drs. KH. Fathurrahim Ahmad, M.Pd.I, tanggal 10 November 2017.

³⁸ Lihat Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 53.

³⁹ Wawancara dengan KH. Fathurrahim, tanggal 25 Februari 2018.

dan lain sebagainya, selalu menekankan akan pentingnya toleransi antar umat beragama yang dalam proses belajar mengajarnya dilakukan atau ditanamkan secara langsung (*direct teaching*) dan tidak langsung (*indirect teaching*). Dalam proses belajar mengajarnya, ia dan para pembantunya (ustaz) selain menggunakan sistem pengajaran sorogan dan bandongan,⁴⁰ juga banyak menggunakan metode diskusi dan ceramah. Dalam metode ceramah, seringkali ia menanamkan beberapa perilaku yang umum menjadi ciri khas dari banyak pesantren di Indonesia, antara lain;

Pertama, nilai keanekaragaman (*at-tanawwu'iyah*). Dalam praktiknya, setiap pembahasan yang menjadikan kitab kuning sebagai referensi utama, ia selalu menjelaskan, bahwa keanekaragaman merupakan *sunatullah*. Sehingga hal ini dapat dijadikan pijakan untuk berinteraksi antar sesama warga pesantren terlebih lagi dengan lingkungan masyarakat sekitar pesantren yang mayoritas beragama Hindu. Di kalangan pesantren, nilai keanekaragaman sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena keanekaragaman merupakan salah satu doktrin yang kompatibel dengan keanekaragaman kurikulum yang diberikan oleh pesantren kepada para santrinya. Yaitu; kurikulum pendidikan agama Islam, kurikulum pengalaman dan pendidikan moral, kurikulum pendidikan umum dan sekolah, serta kurikulum pendidikan keterampilan dan kursus.

Kedua, nilai persamaan dan keadilan (*al-musawah wal-'adl, at-tasamuh*). KH. Fathurrahim selalu mentradisikan nilai persamaan dan keadilan di lingkungan pesantren yang ia pimpin dengan mendasarkan prosesnya pada al-Qur'an (QS.5:8), (QS.11:118-119). Ia juga menghimbau kepada seluruh ustaz, agar semua santri berhak memperoleh pendidikan dan pelayanan yang sama dari pesantren serta untuk berinteraksi dengan sesama santri di lingkungan pesantren. Semua santri memiliki kewajiban yang sama, tanpa memandang asal usul daerah santri dan status sosial ekonominya. Berangkat dari pembiasaan tradisi ini, menurutnya akan berimbas pada perilaku santri ketika berinteraksi di tengah masyarakat, yaitu santri dapat bersikap adil kepada sesama manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan.

⁴⁰ Sorogan adalah sistem pengajaran individual dimana dalam pengajarannya santri dan ustaz saling berhadap-hadapan. Sementara bandongan sistem pengajaran yang dalam aplikasinya 5-50 murid mendengarkan seorang guru membaca, menerjemahkan, menerangkan, bahkan seringkali mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, 54.

Ketiga, toleransi (al-tasamuh). Para santri diajarkan untuk saling memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di pesantren seperti; minat, kepribadian, asal usul daerah, kecerdasan, dan status sosial ekonomi santri. Lalu dalam aktivitas pembelajarannya, ia selalu mengkontekstualisasikan nilai-nilai *tasamuh* tersebut dengan warga di lingkungan pesantren yang mayoritas beragama Hindu, ia juga selalu menghimbau kepada para santrinya untuk tidak saling membenci, menghardik serta tetap menerima perbedaan yang ada, ditambah lagi ia sering menceritakan hubungan baik antara umat Hindu dan Islam di Jembrana.

Keempat, musyawarah (al-musyawah). Dalam implementasinya dijadikan metode untuk mengkaji kitab-kitab Islam klasik bagi para santri senior untuk membahas persoalan-persoalan keagamaan untuk diturunkan kepada santri-santri junior. Tujuan KH. Fathurrahim menerapkan metode musyawarah adalah untuk membiasakan para santri bermusyawarah di lingkungannya kelak yang bisa jadi sangat majemuk.

Kelima, persaudaraan dan persamaan (al-ukhuwwah). Sesungguhnya nilai persaudaraan dan kebersamaan hidup di lingkungan pesantren didasarkan pada tradisi salat berjamaah. Pesantren menjadikan salat jamaah sebagai salah satu kegiatan yang harus diikuti oleh semua santri. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan para kiai bahwa praktik salat jamaah ini mengajarkan persaudaraan dan kebersamaan, yaitu nilai-nilai yang harus ditumbuhkan dalam masyarakat Islam begitu juga dengan tradisi saling tolong menolong juga merupakan nilai dari persaudaraan dan keadilan.

Nilai persaudaraan dan persamaan yang ditanamkan kepada para santri di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, dilatar belakangi oleh tiga hal; 1) para santri merasa sama-sama jauh dari keluarga; 2) para santri meyakini sama-sama orang Islam, dan 3) mereka memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Yaitu sama-sama belajar tentang materi-materi ke-Islaman. Dalam konteks hubungan bermasyarakat, nilai persaudaraan dan persamaan ini menjadi sesuatu yang wajib untuk diterapkan dalam berinteraksi antar umat beragama. Karena jika hal ini tidak dilakukan, maka konflik atau segala macam jenis kekerasan akan mudah bersemi dengan sendirinya, baik itu di-organisasi oleh kelompok tertentu ataupun tidak.⁴¹

⁴¹ Contoh kebiasaan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu di kalangan para santri dapat dilihat dari cara pandang mereka tentang hak milik. Meskipun di pesantren ada pengakuan hak milik

Keenam, perdamaian (*al-salam*). Umumnya konsep perdamaian ini biasa disosialisasikan dan diimplementasikan melalui kegiatan ritual keagamaan sehari-hari, terutama setelah salat lima waktu berjamaah. Sebagaimana diakui oleh KH. Fathurrahim, dalam setiap salat berjamaah, santri secara bersama melakukan zikir dan wirid.⁴² Dari sekian banyak bacaan zikir yang dibaca oleh para santri, ada bacaan yang mengandung nilai-nilai perdamaian, seperti: "Allahumma antassalam, wa minkassalam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabana bissalam, wa adkhilnal jannata darassalam, tabarakta rabana wata'alaita ya dzal jalali wal ikram." Yang berarti, "ya Allah, Engkau adalah kedamaian/keselamatan dan dari-Mulah kedamaian/keselamatan dan kepada-Mu lah kembalinya kedamaian/keselamatan maka hidupkanlah kami ya Allah dengan kedamaian/keselamatan dan masukkanlah kami ke dalam surga tempat yang damai. Maha suci engkau dan maha tinggi wahai Tuhan kami yang memiliki kebesaran dan kemuliaan".

Bacaan di atas mengandung pengertian bahwa nilai perdamaian merupakan harapan dan cita-cita semua santri dalam kehidupan sosial sehari-hari, baik di lingkungan pesantren maupun di masyarakat secara luas untuk memperoleh kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian.

Secara umum, tradisi yang biasa dikembangkan pesantren—yang berguna untuk mencapai hidup yang damai dan harmonis—adalah melalui pembiasaan mengucapkan salam pada momen-momen tertentu. Kebiasaan mengucapkan salam ini didasarkan pada perintah Nabi Muhammad SAW agar umat Islam gemar menebar salam (*afsyussalam*). Dalam praktiknya, kebiasaan menebar salam ini dilakukan oleh kiai dan para ustaz pada setiap memulai pengajaran kitab-kitab Islam klasik, pada saat memulai khotbah, pengajian, dan pengarahan kepada para santri. Selain itu, ucapan salam juga selalu diberikan oleh para santri pada saat mereka saling bertemu, baik di tempat pengajian, perpustakaan, kantin, dan masjid. Kebiasaan saling memberi salam ini sesungguhnya merupakan salah satu cara pesantren untuk membangun

pribadi, dalam praktiknya, hak milik itu seperti menjadi milik umum atau bersama. Barang-barang yang sepele, seperti sandal, sepatu, baju, peci, sarung, dan lain sebagainya dipakai secara bebas. Untuk barang yang lain, jika tidak dipakai akan dipinjamkan bila diminta. Santri yang menolak meminjamkan barang-barang tersebut akan memperoleh sanksi sosial dari kawan-kawannya. Ronald Alan Lukens-Bull, *Jihad ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika*, terj. Abdurrahman Mas'ud. (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 74.

⁴² Bacaan-bacaan yang biasa dibaca oleh para santri setelah salat lima waktu adalah istigfar, solawat, tasbih, tahlil, tahmid, dan doa. Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995), 215.

hubungan sosial yang harmonis, damai, serta jauh dari konflik dan kekerasan.⁴³

Dengan terbiasanya para santri mengamalkan enam perilaku yang menjadi laku umum pada pesantren di atas, maka dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan itu akan tertular dan dikembangkan pada kehidupannya di masyarakat. Di samping mengimplementasikan model pembelajaran *transformative learning* tersebut, peran keteladanan yang ditunjukkan oleh seorang kiai (pengasuh pesantren) di pesantren juga menjadi sangat *urgent*.⁴⁴ Hiroko Horikosi, sebagaimana dikutip oleh Abd. Halim Soebahar, menggambarkan tentang profil kiai, menurutnya:

“Kiai menduduki posisi sentral dalam masyarakat Islam tradisional dan menyatukan berbagai golongan hingga mampu melakukan tindakan kolektif, jika diperlukan. Kiai juga mengambil peran sebagai poros hubungan antara umat dan Tuhan. Sifat hubungan antara kiai dengan masyarakat adalah kolektif. Kiai dalam kehidupan pondok pesantren merupakan komponen yang paling esensial. Sehingga wajar jika pertumbuhan suatu pondok pesantren amat tergantung pada kemampuan pribadi tersebut”.⁴⁵

Seorang kiai juga sangat memegang peranan penting dalam proses keteladanan di pesantren. Mustahil jika berkeinginan menciptakan manusia yang mampu melintas batas tradisi dan keagamaan orang lain, sementara jika kiai-nya berwawasan atau memiliki akhlak sosial yang sempit. Intelektualitas tanpa dibarengi dengan akhlak yang luhur—untuk tidak mengatakan luas—bisa dan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan politik lokal.⁴⁶ KH. Fathurrahim, selain memiliki ilmu pengetahuan agama yang dalam dan tauhid sosial yang baik, ia juga memiliki wawasan kebangsaan yang luas serta berakidah inklusif. Peran dan sikapnya yang inklusif, berdampak positif bagi pengembangan karakter warga pesantren (santri) dan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pesantren.⁴⁷ Apabila kiai

⁴³ Abdullah Aly, “Studi Deskriptif Tentang Nilai-Nilai Multikultural dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam”, *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 1, No. 1 (2015): 9-24.

⁴⁴ Pam Nilan, “The Spirit of Education in Indonesian (Pesantren)”, *British Journal of Sociology of Education*, 30, No. 2 (2010): 219-232.

⁴⁵ Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, 38.

⁴⁶ Al Makin, “Teladan Intelektual-Pemimpin yang Berkarakter”, dalam Festschrift untuk M. Amin Abdullah, *Islam dan Agama-agama dan Nilai Kemanusiaan* (Yogyakarta: CISForm, 2013), 273

⁴⁷ Daya tarik secara individual yang dimiliki oleh seorang kiai menentukan banyak sedikitnya jumlah santri yang belajar pada pesantren yang dipimpinnya. Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Keindonesiaan dan Transformasi Kebudayaan*, 112.

bersikap eksklusif, sudah pasti santri dan warga sekitar pesantren juga akan bersikap demikian. Sebaliknya, apabila kiai bersikap inklusif, maka dapat dipastikan seluruh santri dan warga sekitar pesantren juga akan bersikap inklusif.

Selain itu juga, dalam kesehariannya, KH. Fathurrahim,⁴⁸ selain sebagai pengasuh pondok pesantren, dia juga merupakan anggota forum komunikasi umat beragama (FKUB) Jembrana, sekaligus ketua *Pokjar* (kelompok kerja) pondok pesantren se-Provinsi Bali, yang dalam bentuk keteladanan yang dicontohkan olehnya tidak membatasi individu-individu yang ingin bergabung atau terlibat di lembaga yang ia pimpin. Bahkan, sebagaimana dijelaskan olehnya:

“Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Negara, selain menjadi lembaga pesantren dalam arti yang sebenarnya, lembaga pendidikan agama ini juga membuka program pendidikan paket A, B, dan C yang dari 100 % jumlah siswanya, 78 % beragama Hindu, adapun guru-gurunya, ada yang beragama Hindu, dan Islam dan semua proses pembelajaran-nya dilakukan di lingkungan pesantren dengan tanpa ada perlakuan khusus kepada guru atau siswa yang berbeda agama, semuanya mengalir dan berjalan lancar begitu saja”.

Menurut pengakuan Ketut Pasek, menjadi guru paket C di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, tidak membuat dirinya merasa canggung, takut, bahkan ter-intimidasi, sekalipun dia mengajar pada sebuah lembaga pendidikan yang notabene berbasis keagamaan ke-Islaman yang kuat.⁴⁹ Dia menambahkan, “tidak ada sesuatu yang perlu dirisaukan atau bahkan dikhawatirkan berada di lingkungan pesantren Nuris (kependekan dari Nurul Ikhlas)”. Hal yang sama juga dikatakan oleh Kadek Sulastrri, menurutnya, Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, selalu membuka diri terhadap siapa saja yang ingin belajar pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di dalam pesantren.⁵⁰

Menjadi sangat menarik jika diamati, melalui penerapan model pendidikan seperti ini yang dalam proses pembelajaran-nya lebih mengedepankan unsur dialogis, humanis, dan komunikatif dalam mengkonstruksi bangunan jiwa manusia yang terdiri atas *Intelektual Quotation* (IQ), *Emotional Quotation* (EQ), dan *Spiritual Quotation* (SQ), yang pada tataran selanjutnya menghasilkan santri-santri yang berwatak moderat (*wasathiyah*). Karena memang sebenarnya, Islam di

⁴⁸ Wawancara dengan Drs. KH. Fathurrahim Ahmad, M.Pd.I, tanggal 10 November 2017.

⁴⁹ Wawancara dengan Ketut Pasek, tanggal 25 Februari 2018.

⁵⁰ Wawancara dengan Kadek Sulastrri, tanggal 25 Februari 2018.

Indonesia adalah Islam yang bersifat inklusif, akomodatif, dan toleran pada keragaman, baik sesama internal umat Islam maupun dengan para penganut agama-agama lain.⁵¹

Menurut penulis, pesantren haruslah kembali berperan dalam mengembalikan citra pesantren sebagai sebuah lembaga yang senantiasa mengajarkan toleransi umat beragama dan selalu menghadirkan sikap humanis. Karena sesungguhnya pesantren telah memiliki watak inklusif dan terbuka terhadap perbedaan.⁵² Salah satu upaya untuk membentengi para santri agar terhindar dan terlibat radikalisme agama, adalah dengan senantiasa melestarikan dan mengembangkan nilai inklusif, cinta perdamaian, sopan kepada orang lain dengan tanpa sedikitpun menyerahkan diri kepada akibat-akibat koruptif dari modernisasi, giat berkarya, tetapi memiliki akar yang dalam pada kehidupan yang kaya akan refleksi dan meditasi, serta sabar tetapi tekun dalam membangun masyarakat yang adil bagi masa depan.⁵³ Di samping itu juga, pesantren harus membentuk budaya demokratis dan keterbukaan karena ini merupakan salah satu unsur dari model pendidikan *transformative learning*.

Azyumardi Azra, berpandangan, bahwa perubahan substansi dan kelembagaan pesantren dipengaruhi pada “ideologi” yang dianut oleh pesantren tersebut. Menurutnya, secara umum pondok dan atau pesantren masih tetap menganut ideologi *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, baik *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* NU, *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi masyarakat arus utama lain yang juga kian giat mengembangkan pesantren. Dengan tetap memegang paham dan praksis *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, pesantren juga tetap berfungsi menjadi lokus utama dalam pewarisan dan penguatan Islam Nusantara atau Islam Indonesia berwatak *wasathiyyah*. Fungsi ini berguna sebagai pemelihara dan penguatan tradisi Islam Indonesia, transmisi ilmu-ilmu keagamaan, dan sebagai lokus kaderisasi calon ulama.⁵⁴

⁵¹ Azyumardi Azra, “Wasta”, *Republika*, 24 Maret 2016.

⁵² Menurut Zamroni, kultur merupakan totalitas, organisasi *way of life*, termasuk nilai-nilai, norma, lembaga dan karya yang diwariskan antar generasi, dipegang bersama yang mempengaruhi pola pikir, sikap dan pola tindakan seluruh warga (masyarakat pesantren). Lihat Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*, 45.

⁵³ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Keindonesiaan dan Transformasi Kebudayaan*, 155.

⁵⁴ Azyumardi Azra, “Halaqah Pesantren”, *Republika*, 12 Januari 2017.

Kesimpulan

Tulisan di atas mengeksplorasi pengalaman penerapan model *transformative Learning* yang menitik beratkan pada penanaman tiga prinsip persaudaraan dalam khazanah pemikiran Islam. Yaitu; *ukhuwwah Islamiyyah* (persaudaraan karena agama Islam), *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan karena tanah air), dan *ukhuwwah basyaraiyyah* (persaudaraan karena kemanusiaan) melalui metode dialog, reflektif, dan ceramah. Lebih dari itu proses pembentukan karakter santri agar berjiwa pluralis, adalah melalui dengan apa yang disebut panca jiwa pondok pesantren. Yaitu; jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa kemandirian, jiwa ukhuwah Islamiyah, dan jiwa kebebasan.

Nilai-nilai inklusif yang ditanamkan pada lembaga ini, adalah untuk menghormati dan menghargai orang lain dan dijadikan semacam budaya di pesantren. Praktik pengajaran yang diterapkan di pesantren juga berbasis plural-multikultur. Sebab meskipun para santri yang datang ke pesantren yang biasanya memiliki latarbelakang yang berbeda, mulai dari status ekonomi, budaya dan etnis. Tapi ketika mereka sudah masuk dalam komunitas pesantren, ada nilai-nilai moralitas yang mengikat mereka untuk berperilaku sesuai aturan-aturan di pesantren.

Sejak awal para santri masuk dan mengenal dunia pesantren telah mampu memperkenalkan pentingnya persaudaraan diantara para santri yang mempunyai perbedaan latarbelakang dalam satu ikatan nilai dan moralitas, sehingga dengan demikian kerukunan, kedamaian, dan terciptanya sebuah komunitas yang harmonis dapat terealisasi dengan baik.

Pustaka Acuan

- Allazam, Muhammad, 2015, *Learning from Dewey and Vygotsky Perspective*, International Journal of Scientific & Engineering Research, 6, No. 7
- Al Makin, 2013, *Teladan Intelektual-Pemimpin yang Berkarakter*, dalam Festschrift untuk M. Amin Abdullah, *Islam dan Agama-agama dan Nilai Kemanusiaan*, Yogyakarta: CISForm

- Aly, Abdullah, 2015, *Studi Deskriptif Tentang Nilai-Nilai Multikultural dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam*, Jurnal Ilmiah Pesantren, 1, No. 1
- Azra, Azyumardi, 2005, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Cet. II, Jakarta: Prenada Media
- , 1996, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, Jakarta: Paramadina
- , "Wasta", *Republika*, 24 Maret 2016.
- , "Halaqah Pesantren", *Republika*, 12 Januari 2017.
- Bailey, Kanneth D., 1982, *Methods of Social Research*, New York: A Division of Macmillan Publishing Co. Inc.
- Biklen, Robert Bogdan dan Sari Knopp, 1998, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon.
- Borg, Meredith D. Gall, Joyce P. Gall, dan Walter R., 2003, *Educational Research: An Introduction*, 7th eds., Boston: Pearson Education, Inc.
- Boydston, Jo Ann, eds., *John Dewey, the Later Works: 1925-1953*, Jilid, 2, Carbondale, USA: Southern Illinois University Press, 1969.
- Bruinessen, Martin Van, 1995, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan
- Chaer, Moh. Toriqul, 2016, *Islam dan Pendidikan Cinta Damai*, Jurnal Pendidikan Islam, 2, No. 1
- Dewey, John, 1964, *Democracy and Education, an Introduction to the Philosophy of Education*, New York: The Macmillan Company
- Dhofier, Zamakhsyaryi, 2011, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Egan, Keiran, 2002, *Getting it Wrong from the Beginning Our Progressivist Inheritance from Herbert Spancer, John Dewey and Jean Peaget*, Binghamtom: Vail Ballou

- Gade, Syabuddin, 2011, *Perbandingan Konsep Dasar Pendidikan antara Dewey dan Asy-Syaibani*, Jurnal Ilmiah Didaktika, 7, No. 1.
- Guba, Yvonna S. Lincoln dan Egon G., 1985, *Naturalistic Inquiry*, Newbury Park: SAGE
- Haedari, Amin et al., 2004, *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*, Cet. I, Jakarta: IRD Press
- Hamdi, Saipul, 2017, *Pesantren dan Gerakan Feminisme di Indonesia*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
- Howlett, Charles F., 2008, *John Dewey and Peace Education*, Columbia: Columbia University
- Idris, Saifullah, 2014, *Demokrasi dan Filsafat Pendidikan*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press
- Lukens-Bull, Ronald Alan, 2004, *Jihad ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika*, terj. Abdurrahman Mas'ud. Yogyakarta: Gama Media
- Machali, Imam, 2013, *Peace education dan deradikalisasi agama*, Jurnal Pendidikan Islam, 2, No. 1
- Mar'ati, Rela, 2014, *Pesantren Sebagai Basis Pendidikan Karakter: Tinjauan Psikologis*, Jurnal Al-Murabbi, 1, No. 01
- Ma'arif, Syamsul, 2012, *Transformative Learning Dalam Membangun Pesantren berbasis Multikultural*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 1, No.1
- Merriam, Sharan B., 2009, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, USA: The Jossey-Bass
- Neuman, W. Lawrence, 2003, *Social Research Methods (Qualitative and Quantitative Approaches)*, eds., Boston: Allyn and Bacon.
- Nilan, Pam, 2010, *The Spirit of Education in Indonesian (Pesantren)*, British Journal of Sociology of Education, 30, No. 2.
- Ramayulis, 2014, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia
- Saputra, R. Ridwan Hasan, 2016, *Berfikir Supra Rasional*, Jakarta: Republika

- Soebahar, Abd. Halim, 2013, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Surayin, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Yrama Widya.
- Wahid, Abdurrahman, 2007, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Keindonesiaan dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta, the Wahid Institut.
- Yazid, Abu, 2018, *Paradigma Baru Pesantren: Menuju Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Zuhri, Saifuddin, 1979, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'rifat.
- Zamroni, 2011, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.